

KOLABORASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BENGKULU

Abel Alhafid Andino

NPP. 32.0243

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: 32.0243@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem Formulation/Background (GAP): Flood disaster management in Bengkulu City presents a serious challenge due to the high frequency of occurrences and their significant impacts. Although the Regional Disaster Management Agency (BPBD) has established collaboration with mass media and the business sector, such cooperation remains limited to the emergency response phase, such as information dissemination and aid distribution. This highlights a gap between the existing collaborative practices and the ideal concept of collaborative governance, which should involve active cross-sectoral engagement across all phases of disaster management—ranging from the pre-disaster phase (mitigation and preparedness), during the disaster, to the post-disaster phase (recovery and rehabilitation). **Purpose:** This study aims to analyze the forms of cross-sector collaboration undertaken by BPBD in flood disaster management in Bengkulu City. **Method:** A qualitative approach was adopted, employing data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on the concept of collaborative governance. **Results:** The research findings indicate that collaboration in flood disaster management in Bengkulu City has been established among the Regional Disaster Management Agency (BPBD), mass media (RRI), the business sector (Perumda Tirta Hidayah), and the community. However, this collaboration remains limited and has yet to fully address the mitigation phase. According to BPBD data, in 2022 there were 29 flood incidents affecting 20 urban villages and 4,086 households. Most of the collaboration efforts have focused primarily on information dissemination and logistical distribution during disasters. The role of the business sector has not been incorporated into long-term planning, and community participation in preparedness remains minimal. Furthermore, there is no permanent collaborative forum to systematically coordinate cross-sector efforts. These findings highlight the need to strengthen the integration of stakeholder roles across all phases of disaster management. **Conclusion:** While collaboration in flood disaster management in Bengkulu City is underway, it requires strengthening through better integration of roles among stakeholders, enhancing community awareness, and establishing permanent collaborative forums. This study contributes to developing adaptive and sustainable disaster management policies.

Keywords: Collaboration, Flood Management, Flood

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu menjadi tantangan serius akibat frekuensi kejadian yang tinggi dan dampaknya yang signifikan. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membangun kolaborasi dengan pihak media massa dan dunia usaha, bentuk kerja sama tersebut masih terbatas pada fase tanggap darurat seperti penyebaran informasi dan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kolaborasi yang berjalan dengan konsep collaborative governance yang

ideal, yang semestinya mencakup keterlibatan lintas sektor secara aktif dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori kolaborasi dan efektivitas dalam pengelolaan bencana. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu telah terjalin antara BPBD, media massa (RRI), dunia usaha (Perumda Tirta Hidayah), dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum menyentuh tahap mitigasi secara menyeluruh. Berdasarkan data dari BPBD, pada tahun 2022 terdapat 29 kejadian banjir yang berdampak pada 20 kelurahan dan 4.086 kepala keluarga. Kolaborasi yang dilakukan sebagian besar hanya berfokus pada penyebaran informasi dan distribusi logistik saat bencana terjadi. Peran dunia usaha belum masuk dalam perencanaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat masih minim dalam hal kesiapsiagaan. Selain itu, belum terdapat forum kolaboratif permanen yang mengatur koordinasi lintas sektor secara sistematis. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi peran antar pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. **Kesimpulan:** Kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu telah dilakukan, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan perencanaan jangka panjang, pelibatan masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Kolaborasi, Penanggulangan Bencana, Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan iklim tropis yang membuatnya rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk banjir. Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dan membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Fenomena ini diperkuat oleh data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan tingginya frekuensi banjir di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu sendiri memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan topografi bergelombang serta dialiri oleh banyak sungai. Hal ini menyebabkan wilayah ini rentan terhadap bencana banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Surdinata (2001) menekankan pentingnya pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara bersamaan dalam menjaga ketahanan nasional. Berdasarkan data IRBI 2023, sebagian besar wilayah di Provinsi Bengkulu, termasuk Kota Bengkulu, memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi. Khusus di Kota Bengkulu, banjir tercatat sebagai bencana yang paling sering terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, dengan jumlah kejadian mencapai puluhan kasus setiap tahunnya dan ribuan kepala keluarga terdampak.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu telah berupaya melakukan penanggulangan risiko banjir. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan media massa (Radio Republik Indonesia Kota Bengkulu) dan dunia usaha (Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi bencana serta mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir.

Namun demikian, dari hasil observasi awal, diketahui bahwa kolaborasi yang dilakukan masih bersifat terbatas, yakni sebatas penyebaran informasi saat bencana terjadi. Belum terlihat

adanya upaya kolaboratif yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam konteks ini, model collaborative governance menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Collaborative governance mendorong sinergi antara pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan bencana seperti banjir. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2021) menekankan bahwa keberhasilan collaborative governance regime sangat bergantung pada adanya komitmen bersama dan mekanisme koordinasi yang jelas di antara para aktor dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu, Rahmayanti (2021) menggarisbawahi pentingnya penyelarasan peran antar sektor untuk meningkatkan efektivitas strategi pengurangan risiko bencana di Jakarta. Sedangkan Dwirahmadi et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi antara pengurangan risiko bencana (DRR) dan adaptasi perubahan iklim (CCA) melalui collaborative governance dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko banjir di Jakarta.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana bentuk kolaborasi lintas sektor yang telah dilakukan BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik kolaborasi serta menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan..

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam konsep collaborative governance, kolaborasi antarpemangku kepentingan idealnya mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana (tanggap darurat), hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Kolaborasi ini seharusnya melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat secara aktif dan terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penanggulangan bencana.

Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, bentuk kolaborasi yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu bersama dengan sektor non-pemerintah seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Perumda Tirta Hidayah, masih terbatas pada aspek penyebaran informasi saat terjadi bencana dan distribusi logistik darurat. Kolaborasi tersebut belum menyentuh tahap perencanaan strategis jangka panjang serta belum mengarah pada upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana secara mandiri.

Selain itu, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Peran dunia usaha cenderung bersifat reaktif dan tidak terlibat dalam forum perencanaan terpadu, sementara partisipasi masyarakat masih minim, khususnya dalam kegiatan kesiapsiagaan seperti simulasi bencana, pelatihan tanggap darurat, dan pengelolaan lingkungan. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal kolaborasi penanggulangan bencana berdasarkan prinsip collaborative governance dengan praktik aktual di Kota Bengkulu. Hal ini menandakan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang telah berjalan, serta mengungkap faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung agar kolaborasi tersebut dapat diperluas dan dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana

banjir secara berkelanjutan..

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir.

Penelitian pertama oleh Aira Riska (2023) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Banjir di kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan diketahui tidak terdapat sebuah aturan atau kesepakatan dalam pelaksanaan kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan setiap dinas atau instansi sudah memiliki aturan serta tugas dan fungsi masing-masing. Sebenarnya jika terdapat aturan atau perjanjian dalam kolaborasi penanggulangan banjir, pelaksanaan kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan terstruktur dan terorganisir dengan baik.

Penelitian kedua oleh Aziz Masyhuri (2021) yang berjudul *Kolaborasi Antar Stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di kota Semarang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama sering terjadinya tanah longsor di Kota Semarang adalah kurang tertibnya tata guna lahan. Karena keterbatasan sumber daya pemerintah, terutama BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas. Meskipun kolaborasi telah dilakukan, masih ada hambatan seperti koordinasi yang terbatas, kurangnya personel, serta rendahnya inisiatif masyarakat dalam pencegahan. Selain itu, manajemen bencana sering kurang efektif karena persiapannya baru dilakukan mendekati musim penghujan, sehingga kolaborasi ini memerlukan perbaikan lebih lanjut. Harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerja sama antar stakeholders dalam proses kolaborasi dan manajemen bencana tanah longsor di kota Semarang.

Penelitian ketiga oleh Alyaa Larasati Hasna (2023) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam mitigasi bencana banjir Rob di kota Pekalongan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob di Kota Pekalongan antara Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation telah memenuhi indikator keberhasilan, dengan beberapa program berhasil memitigasi dampak banjir rob. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan belum meratanya implementasi program ke seluruh wilayah terdampak. Upaya kerja sama terus berlanjut, termasuk pembangunan MCK Adaptif, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Penelitian keempat oleh Insyiroh, Indarti, dan Darmi (2023) yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu telah menjalankan perannya dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rawa Makmur dengan cukup baik. BPBD berhasil menjalin kolaborasi dengan masyarakat setempat, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait lainnya dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana banjir. Meskipun demikian, pelaksanaan program pencegahan dan rehabilitasi masih menghadapi kendala, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang maksimal antar stakeholder, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, BPBD perlu meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan serta memperkuat pelatihan dan sosialisasi agar efektivitas

penanggulangan banjir dapat ditingkatkan.

Penelitian kelima oleh Jumiati dan Ledyawati (2023) yang berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Mitigasi Bencana Banjir. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah melaksanakan program mitigasi bencana banjir secara komprehensif melalui tiga tahapan, yakni pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Pada tahap pra-bencana, dilakukan edukasi kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan banjir, dan koordinasi antar lembaga yang terkait. Saat bencana terjadi, respon cepat berupa evakuasi, distribusi bantuan logistik, dan komunikasi antar lembaga berjalan dengan efektif. Pada tahap pasca-bencana, fokus diberikan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang terdampak. Kolaborasi yang terjalin antara BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat berjalan secara sinergis, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal koordinasi dan pemenuhan sumber daya. Pendekatan teoritis struktural-fungsionalisme Parsons dalam penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana berbagai komponen sosial bekerja bersama-sama dalam sistem yang terpadu untuk mengatasi bencana banjir.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan lima penelitian sebelumnya, ditinjau dari aspek fokus kajian, pendekatan teoritik, lokus penelitian, serta temuan empiris yang dihasilkan.

Pertama, dari sisi fokus, penelitian ini secara spesifik menganalisis praktik collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu dengan menyoroti tiga aktor utama: BPBD, media massa (RRI), dan dunia usaha (Perumda Tirta Hidayah). Ini berbeda dengan penelitian Aira Riska (2023), Alyaa Larasati (2023), dan Aziz Masyhuri (2021) yang lebih berfokus pada minimnya kerangka formal kolaborasi atau kolaborasi yang bersifat sektoral.

Kedua, dari segi pendekatan teoritik, penelitian ini menggunakan kerangka collaborative governance secara komprehensif dengan menelaah tahapan kolaborasi mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti fase tanggap darurat atau mitigasi, tanpa melihat kesinambungan antar fase dalam manajemen bencana.

Ketiga, dari sisi lokus, penelitian ini mengambil studi kasus Kota Bengkulu yang memiliki indeks risiko bencana tinggi (IRBI 2023) dan menjadi salah satu kota paling rawan banjir di Indonesia. Lokus ini belum pernah dikaji dengan pendekatan collaborative governance, meskipun sebelumnya diteliti dari sudut pandang peran BPBD saja seperti oleh Jumiati dan Ledyawati (2023), serta Insyiroh et al. (2023).

Keempat, kebaruan juga tampak dari temuan lapangan yang menunjukkan kolaborasi antar aktor masih terbatas pada tahap penyebaran informasi saat bencana. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidakterpaduan lintas sektor dan kurangnya integrasi dalam perencanaan jangka panjang. Penelitian ini juga menawarkan strategi penguatan kolaborasi yang aplikatif melalui pembentukan forum permanen lintas sektor dan peningkatan peran masyarakat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam pengembangan governance model kebencanaan di daerah rawan banjir, serta mengisi kekosongan literatur tentang penerapan model kolaboratif secara berkelanjutan dalam konteks daerah dengan keterbatasan sumber daya dan risiko tinggi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. Faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi perspektif berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana banjir. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana kolaborasi antar lembaga, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) diimplementasikan, apa saja kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yang dapat dilakukan melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir.

Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh (Moleong, 2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 8 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu hingga masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui proses kolaborasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir

di Kota Bengkulu, Peneliti menggunakan Kolaborasi Teori Collaborative Governance menurut Teori Ansell dan Gash (2007) terdapat 5 dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Dialog Antar Muka dengan indikatornya Terjalin diskusi secara baik antar pihak dan Adanya rasa saling menghargai antar pihak.
2. Membangun Kepercayaan dengan indikatornya Komunikasi yang intensif dan Keterbukaan antar pihak
3. Komitmen pada Proses dengan indikatornya Adanya misi yang jelas dan Saling ketergantungan.
4. Pemahaman Bersama dengan indikatornya Adanya persamaan tujuan dan Adanya penyatuan pemikiran antar pihak.
5. Dampak Sementara dengan indikatornya Adanya umpan-balik yang positif dan Tanggung jawab antar pihak

3.1 Efektivitas Penerapan Pajak Non Tunai dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Simalungun

Pada dimensi dialog tatap muka, kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu telah menunjukkan adanya komunikasi formal yang dibangun melalui forum koordinasi antar instansi seperti BPBD, RRI, dan Perumda Tirta Hidayah. Kegiatan rapat koordinasi, penyampaian informasi secara langsung, dan pelibatan masyarakat dalam sosialisasi menjadi bentuk nyata dari dialog yang terbuka antar pihak. Meski demikian, partisipasi dialog masih didominasi oleh aktor pemerintah, sementara keterlibatan sektor swasta dan masyarakat masih bersifat pasif. Oleh karena itu, dimensi ini dinilai cukup efektif, namun perlu ditingkatkan melalui perluasan forum partisipatif yang lebih inklusif dan berkala.

Dalam aspek membangun kepercayaan, terdapat hubungan yang relatif baik antara BPBD dan mitra kolaborasinya, ditandai dengan kesediaan berbagi informasi dan peran dalam penanggulangan bencana. Misalnya, RRI secara konsisten menyiarkan informasi darurat, sementara Perumda Tirta Hidayah mendukung logistik pasca banjir. Namun, keterbatasan transparansi dalam alur data dan ketidaksinkronan waktu respons antar pihak masih menjadi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan antar pihak belum sepenuhnya kuat. Oleh karena itu, dimensi ini dinilai cukup, dan ke depannya perlu dibangun dengan memperjelas pembagian peran, alur komunikasi, dan evaluasi bersama secara rutin.

Komitmen terhadap proses terlihat dari keberlanjutan kerja sama antarpihak sejak tahap prabencana hingga pascabencana. Misalnya, penyusunan SOP bersama dan pelatihan penanggulangan banjir menjadi bukti adanya usaha lintas sektor dalam membangun sistem yang berkelanjutan. Namun, komitmen ini belum tertuang dalam dokumen formal seperti perjanjian kerja sama atau MoU, sehingga rawan tidak berlanjut bila terjadi pergantian pejabat atau perubahan prioritas anggaran. Dengan demikian, komitmen terhadap proses dinilai cukup, tetapi masih perlu diperkuat melalui legalisasi mekanisme kolaborasi dan alokasi anggaran khusus

Pada dimensi pemahaman bersama, terdapat kesamaan tujuan antar aktor untuk meminimalkan dampak banjir dan meningkatkan respons tanggap darurat. Sosialisasi bersama, penyusunan peta rawan bencana, dan kampanye kesadaran publik mencerminkan bahwa kolaborasi sudah berjalan menuju visi bersama. Namun, belum semua stakeholder memahami urgensi integrasi peran secara menyeluruh, terutama di tingkat masyarakat. Beberapa pihak masih bekerja secara sektoral. Maka dari itu, dimensi ini dinilai cukup baik, namun perlu diperkuat dengan pelatihan lintas sektor dan forum reflektif antar mitra.

Dimensi hasil antara menunjukkan adanya hasil konkret dari kolaborasi, seperti

berkurangnya waktu respons tanggap darurat dan meningkatnya penyebaran informasi banjir melalui media. RRI dan BPBD secara rutin menyampaikan peringatan dini yang berdampak pada kesiapan masyarakat. Akan tetapi, belum semua wilayah terdampak dapat dijangkau secara merata karena keterbatasan teknologi dan SDM. Oleh karena itu, hasil antara dinilai cukup efektif, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan layanan dan peningkatan infrastruktur siaga bencana.

3.2 Hambatan yang dialami dalam Kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di kota Bengkulu

Seperti yang diketahui bersama bahwa setiap acara atau kegiatan yang dilakukan dalam bentuk apapun pastinya tidak mungkin selalu berjalan mulus. Pasti ada saja kendala-kendala atau hambatan baik dalam persiapannya maupun pelaksanaannya. Sama halnya dengan program yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan, apalagi dalam program itu melibatkan beberapa pihak yang memiliki perbedaan baik dalam latar belakangnya maupun tugas dan fungsinya.

Dalam upaya penanggulangan bencana banjir di kota Bengkulu terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Lokasi Kantor BPBD Kota Bengkulu berada di satu titik, sedangkan wilayah Kota Bengkulu memiliki beberapa daerah rawan banjir dengan jarak yang cukup jauh dan akses yang terkadang sulit dijangkau, terutama saat banjir melanda. Hal ini menjadi kendala dalam upaya penanggulangan banjir secara cepat dan efektif. Selain itu, kondisi drainase di Kota Bengkulu yang belum optimal serta meluapnya sungai saat curah hujan tinggi menjadi faktor utama penyebab banjir, yang mengakibatkan genangan air dan kerusakan infrastruktur. Kendala lainnya adalah keterbatasan kompetensi personel BPBD Kota Bengkulu dalam pengelolaan media dan komunikasi, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait sosialisasi dan edukasi bencana banjir belum dapat dilakukan secara maksimal secara mandiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.

Dalam sebuah hubungan kolaborasi, tiap pihak memiliki tugas fungsinya yang berbeda-beda. Hal tersebut akan memiliki kendala-kendala yang menghambat proses kolaborasi. Tentunya tidak dapat dipungkiri tiap pihak memiliki kekurangan dalam menghadapi permasalahannya. Maka dari itu, tujuan dibangunnya kolaborasi ialah agar mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Namun realitanya pada proses kolaborasi ada saja terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Kemudian terkait kolaborasi antara BPBD, media massa, dan masyarakat masih ditemukan beberapa kendala. Contohnya pada masalah anggaran. faktor penghambat dalam proses kolaborasi ialah kesadaran pribadi dalam hal ini personel yang belum memiliki rasa tanggung jawab ketika bertugas.

3.3 Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat yang ada dalam Kolaborasi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu

Untuk mengatasi kendala yang menghambat jalannya penanggulangan bencana banjir, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan dari pihak yang terlibat untuk meminimalisir kendala tersebut. Seperti untuk mengatasi kendala kompetensi personel BPBD yakni dengan diadakannya peningkatan kompetensi melalui training yang diselenggarakan bersama BPBA. BPBD Kota Bengkulu berupaya aktif mengirimkan personel untuk mengikuti training dengan Badan Penanggulangan Bencana daerah guna meningkatkan kompetensi pegawai. Namun untuk kegiatan training yang diinisiasikan BPBD sendiri belum dilaksanakan. BPBD juga kerap mengikuti giat

integrasi dengan OPD yang ada di Kota Bengkulu atau dengan instansi lain seperti TNI/POLRI. Bentuk giat integrasi yang diikuti ialah apel siap siaga yang bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan pihak terkait dalam menghadapi bencana dan untuk menjalin hubungan baik antar pihak yang terlibat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPBD, media massa (RRI), dunia usaha (Perumda Tirta Hidayah), dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu telah berjalan, namun belum optimal. Kolaborasi tersebut lebih dominan pada fase tanggap darurat, seperti penyebaran informasi dan penanganan logistik saat bencana. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta belum menyentuh aspek perencanaan strategis jangka panjang atau peningkatan kapasitas berkelanjutan. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya partisipasi aktif masyarakat, keterbatasan sumber daya BPBD, serta tidak adanya forum kolaboratif permanen yang mengatur pembagian peran secara sistematis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Aira Riska (2023) yang menunjukkan bahwa di Kota Banda Aceh, kolaborasi antar instansi masih belum didukung oleh aturan formal, sehingga koordinasi berjalan tidak terstruktur. Hal serupa juga terjadi di Kota Bengkulu, di mana meskipun sinergi lintas sektor ada, belum ada dokumen formal seperti MoU atau SOP yang mengikat peran antar pihak. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Aziz Masyhuri (2021) di Semarang yang menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan inisiatif dari aktor non-pemerintah.

Di sisi lain, berbeda dengan penelitian Alyaa Larasati (2023) yang meneliti mitigasi banjir rob di Pekalongan, kolaborasi di sana sudah lebih terstruktur dan berbasis program pembangunan adaptif seperti MCK tahan banjir. Sementara itu, di Kota Bengkulu, belum ada inovasi kolaboratif yang bersifat teknis-fisik, dan intervensi masih berfokus pada sosialisasi serta respons saat bencana terjadi.

Temuan ini diperkuat oleh dua penelitian terbaru di Kota Bengkulu. Penelitian oleh Insiroh, Indarti, dan Darmi (2023) mengungkapkan bahwa BPBD berhasil menjalin kolaborasi dengan masyarakat dan kelurahan dalam mitigasi banjir, namun masih terkendala koordinasi antar stakeholder dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam penelitian ini, di mana masyarakat cenderung pasif dan keterlibatan mereka lebih bersifat sebagai penerima informasi. Sementara itu, penelitian Jumiati dan Ledyawati (2023) menemukan bahwa kolaborasi BPBD di Kota Bengkulu telah melibatkan fase pra, saat, dan pasca bencana dengan pendekatan struktural-fungsional. Namun, penelitian ini justru menunjukkan bahwa integrasi antar fase tersebut belum sepenuhnya berjalan secara sinergis karena tidak ada forum penghubung yang menyatukan kepentingan antarpihak.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil-hasil sebelumnya dalam hal pentingnya kolaborasi antar stakeholder, namun sekaligus memperluas pemahaman tentang tantangan struktural dan budaya dalam pelaksanaan kolaborasi di Kota Bengkulu. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya penguatan institusional melalui pembentukan forum kolaborasi permanen, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan dunia usaha dan media secara lebih aktif dalam fase prabencana dan rehabilitasi. Model kolaboratif yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar penanggulangan banjir tidak hanya bersifat reaktif, melainkan transformatif dan partisipatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi yang terjadi antara BPBD, RRI Kota Bengkulu, dunia usaha dan masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi telah terlaksana di lapangan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana ialah kurangnya anggaran sehingga program-program yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana agak sulit dikerjakan. Kemudian akibat kurangnya anggaran berdampak pada kurangnya sarana dan prasarana serta kompetensi personel BPBD pada saat terjadinya bencana dan pengelolaan media. Terdapat upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui memberikan kesempatan kepada personel BPBD untuk mengikuti training yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah, serta mengikutsertakan personel pada kegiatan-kegiatan integrasi seperti apel kesiapsiagaan bersama OPD maupun instansi seperti TNI/POLRI.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di satu instansi pemerintahan saja yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Kolaborasi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C, Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18 No. 4, 543-57
- Dwiramadi, F., Solikhah, M., & Sulistyawati, L. (2023). Integrating disaster risk reduction and climate change adaptation through collaborative governance in Jakarta. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 89, 103750. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103750>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2021). Towards a collaborative governance regime for disaster risk reduction. *Land Use Policy*, 107, 105501. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622821001326>
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). *Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 7(1), 25–37.

- <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/24210>
- Insiyroh, S., Indarti, S., & Darmi, T. (2023). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu*. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 17–37. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/5202>
- Jumiati, W., & Ledyawati. (2023). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Mitigasi Bencana Banjir*. *Jurnal Ilmiah IDEA*, 2(2), 17–37. <https://doi.org/10.36085/idea.v2i2.6186>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods* (5th ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304302>
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). *Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854–862. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Rahmayanti, K. P. (2021). *Promote Collaborative Governance? Review of Disaster Risk Reduction Strategy in Jakarta*. University of Indonesia – Scopus Indexed Publication. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/promote-collaborative-governance-review-of-disaster-risk-reductio-2>
- Riska, A. (2023). *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(2), 25–32. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/24441>
- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Cakra Ilmu.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E. (2001). *Geopolitik dan Geostrategik dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. VI, Agustus 2001, hlm. 47.

